

## **PEMBAURAN ETNIS CINA DAN KAUM BUMIPUTRA DI KOTA GARUT PADA ABAD XX**

### ***ETHNIC ASSIMILATION OF CHINESE AND BUMIPUTERA COMMUNITY IN GARUT CITY (HISTORICAL REVIEW)***

**Kunto Sofianto, Widyo Nugrahanto, Agusmanon Yuniadi, Miftahul Falah**

Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

e-mail: kunto.sofianto@unpad.ac.id, widyo.nugrahanto@unpad.ac.id,

agusmanon@unpad.ac.id, miftahul.falah@unpad.ac.id

*Naskah Diterima: 30 Maret 2018*

*Naskah Direvisi: 28 Juli 2018*

*Naskah Disetujui: 10 September 2018*

#### ***Abstrak***

*Artikel ini membicarakan bagaimana proses dan hasil pembauran masyarakat etnis Cina dengan masyarakat bumiputra di Kota Garut, Jawa Barat pada awal hingga pertengahan Abad XX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri empat tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Untuk membantu eksplanasi tentang pembauran itu, penulis menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyulitkan terjadinya pembauran antara kaum bumiputra dan kelompok etnis Cina. Faktor pertama, yaitu akar sejarah yakni status kelompok etnis Cina lebih tinggi daripada golongan bumiputra. Faktor kedua, perasaan Chinese Culturalism yang masih tertanam kuat di kalangan kelompok etnis Cina. Akibatnya, perasaan itu mengarahkan mereka kepada sikap untuk senantiasa berorientasi kepada budaya leluhurnya yang memang sudah tua. Kedua faktor tersebut menyebabkan eksistensi masyarakat etnis Cina di Kota Garut kurang dapat berbaur dengan masyarakat pribumi, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.*

***Kata Kunci:*** Cina, Garut, pendidikan, bahasa, perkawinan, religi, tempat tinggal.

#### ***Abstract***

*This article discusses how the process and result of intermingling of ethnic Chinese society with the General movement in the town of Garut, West Java in the early to mid 20<sup>th</sup> century. Method used in this research is historical method consisting of four steps, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. To assist the explanation of the assimilation, the author uses social sciences, especially sociology, anthropology, psychology, and political science. The conclusion of this research appears to be two factors causing the difficulty of asimilation between Sundanese people and ethnic Chinese group. The first factor, the historical roots in which the Dutch Colonial Government classified Chinese ethnic group into higher position of legal and social than Sundanese people. The second factor, a strong sense of Chinese Culturalism that is still embedded in Chinese ethnic groups, namely a sense that always glorifies the culture of its ancestors. As a result, that a sense leads them to the attitude of always being oriented to the ancient culture of their ancestors. Both factors led to the existence of Chinese ethnic communities in Garut City less can mingle with the indigenous, increasing prominently, both before and after Indonesian independence.*

***Keywords:*** Chinese, Garut, education, language, marriage, religion, housing.

## A. PENDAHULUAN

Masalah pembauran orang-orang keturunan asing di Indonesia, terutama kelompok etnis Cina dari waktu ke waktu nampaknya sangat sukar terwujud. Masih banyak persoalan yang perlu dibenahi berkenaan dengan masalah sosial-budaya, sosial-politik, dan sosial-ekonomi (Rochmawati, 2004: 105). Di dalam perjalanan sejarah Indonesia, banyak terjadi kerusuhan anti Cina. Hal itu menandakan bahwa pembauran sangat sukar terlaksana. Aksi kekerasan terhadap kelompok etnis Cina di Indonesia (khususnya di Pulau Jawa) terjadi di antaranya pada 1963 di hampir seluruh kota Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pada 1973 di Bandung, pada 1996 di Tasikmalaya, pada 13-14 Mei 1998 di Jakarta, dan pada 14 Mei 2000 di Glodok Jakarta (Kartika, 2000: 13 dan Lohanda, dalam Pardede, dkk., 2002: 63). Jauh sebelumnya, pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada 1740 telah terjadi pembantaian kepada orang Cina sehingga lebih dari 10.000 orang Cina terbunuh (Suratminto, 2004: 1).

Sebenarnya, berbagai langkah telah diambil, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan masalah integrasi kelompok etnis Cina. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 1945, Partai Tionghoa Indonesia (PTI) telah mencetuskan ide pembauran. Pada 1960, Menteri Sosial Moeljadi Djojomartono, mengadakan pertemuan dengan dua belas orang pemuda peranakan Cina yang membicarakan masalah perubahan nama. Selain itu, ada anjuran agar peranakan Cina sedikit demi sedikit meninggalkan usaha dan kegiatan-kegiatan yang bersifat eksklusif sehingga memudahkan tercapainya pembauran kultural, ekonomi, bahkan biologis untuk mengurangi jarak pemisah antara mayoritas (bumiputra) dan minoritas (Cina). Namun anjuran itu mendapat reaksi pro dan kontra di masyarakat (Husodo, 1985: 38-39). Pada 1967, dikeluarkan pula keputusan ten-tang

larangan bagi orang Cina pen-datang baru ke Indonesia untuk bekerja dan berusaha. Selain itu, juga diselenggarakan kebijakan di bidang pendidikan yang tidak memperkenankan adanya sekolah asing, di mana anak-anak keturunan etnis Cina dianjurkan untuk memasuki sekolah nasional (Suryadinata, 1984: 115-132).

Sejalan dengan apa yang diuraikan di atas, penulis mencoba menganalisis pembauran etnis Cina dengan kaum pribumi di Kota Garut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu motivasi apa yang mendorong kelompok etnis Cina datang ke Kota Garut? Bagaimana proses pembauran yang terjadi antara etnis Cina dan masyarakat bumiputera di Kota Garut? Bagaimana sikap dan tindakan yang diambil oleh kelompok etnis Cina dalam mengupayakan pembauran dengan masyarakat bumiputra? Faktor apa saja yang menunjang dan menghambat proses pembauran itu? dan bagaimana sikap kaum bumiputra dalam upaya pembauran itu?

Tulisan atau buku yang berhubungan dengan Cina di Indonesia, menurut hemat penulis, sudah banyak ditulis orang. Namun demikian, tulisan atau buku yang secara khusus berhubungan dengan topik yang diteliti oleh penulis, belum pernah ditemukan. Tulisan atau buku yang berhubungan dengan Cina di Indonesia, akan penulis paparkan sebagai berikut. Pertama, buku yang berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* ditulis oleh Leo Suryadinata. Secara umum buku itu memaparkan persepsi masyarakat Indonesia, terutama para pemimpin terhadap orang Cina yang ada di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia II hingga 1975. Sebagian masyarakat Indonesia pada awalnya ada yang menerima dan menolak keberadaan etnis Cina, namun lambat laun masyarakat Indonesia pun akhirnya mau menerima etnis Cina di Indonesia. Di dalam buku itu juga dipaparkan mengenai kedudukan ekonomi etnis Cina yang sangat dominan, pendidikan, bahasa, adat-istiadat, dan keyakinan agamanya. Secara

umum dibahas mengenai asimilasi antara orang Cina dan orang pribumi dalam bidang kebudayaan, meskipun tidak berhasil sepenuhnya. Namun demikian buku itu memberi pemahaman bahwa asimilasi antara etnis Cina dan etnis pribumi masih perlu waktu.

Kedua, buku yang berjudul "Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa" yang diterbitkan pada 1981. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dengan editor Mely G. Tan. Dalam buku itu terdapat tiga tulisan yang ditulis oleh G. William Skinner dengan judul *Golongan Minoritas Tionghoa* (halaman 1-29), Ong Eng Die dengan judul *Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan* (halaman 30-73), dan J. Panglaykim dan I. Palmer dengan judul *Studi Mengenai Kewiraswastaan di Negara-negara: Kisah Sebuah Perusahaan Tionghoa di Indonesia* (74-98). Secara keseluruhan buku ini membahas asal-usul etnis Cina yang datang ke Indonesia berasal dari Provinsi Fukien dan Kwangtung. Di Pulau Jawa, masyarakat Tionghoa yang tumbuh dan berakar di masyarakat setempat dikenal dengan Peranakan Tionghoa, dan sejak zaman Kolonial Belanda mereka tinggal di daerah perkotaan. Oleh karena mereka tinggal di perkotaan, akhirnya mereka secara umum bekerja di sektor perdagangan. Bahkan di Semarang (Jawa Tengah) muncul seorang wiraswatawan bernama Oei Tjie Sien yang berhasil mendirikan perusahaan bernama Oei Tjong Ham Concern atau NV Handel Maatschappij Kian Gwan atau singkatnya NV Kian Gwan atau Kian Gwan.

Ketiga, tulisan yang berjudul *Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia*, karya Puspa Vasanty, di dalam Koentjaraningrat (ed.) yang berjudul "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia" (halaman 346-366), cetakan ke-9 pada 1984 oleh penerbit Djambatan, Jakarta. Dalam tulisan itu dibahas secara umum tentang data demografi orang Tionghoa yang ada di Indonesia, mata pencaharian

hidup, perkampungan dan rumah Tionghoa, sistem kekerabatan, sistem kemasyarakatan orang Tionghoa di Indonesia, religi, pendidikan, dan potensi orang Tionghoa WNI dalam pembangunan. Dalam tulisan itu dibahas juga masuknya orang Tionghoa ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-19. Dengan membaca tulisan Puspa Vasanty, dapat diketahui secara umum kehidupan orang Tionghoa yang ada di Indonesia.

Keempat, buku yang berjudul *Teori & Metode Pelestarian Kawasan Pecinan* ditulis oleh Antariksa, diterbitkan oleh Cahaya Atma Pustaka pada 2016. Buku itu secara umum memaparkan kawasan Pecinan yang memiliki fungsi sebagai kawasan sentra perdagangan dan pemukiman bagi etnis Tionghoa. Hingga saat ini terdapat berbagai pandangan untuk menentukan awal-mula keberadaan Pecinan di Indonesia. Memang sudah diakui bahwa komunitas warga Tionghoa sudah ada sejak masa prakolonial. Kedatangan mereka ke Asia Tenggara disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, bencana alam, kelaparan, dan peperangan. Adapun istilah pelestarian dalam buku itu pada dasarnya mencakup berbagai aspek, yaitu masalah alam, kesenian, arkeologi, ruang terbuka, lingkungan bersejarah, dan kota bersejarah. Adapun pelestarian lingkungan itu mengacu kepada Undang-undang No. 11 tahun 2010.

Kelima, disertasi berjudul *Kerusuhan Anti-Cina di Kota Garut Tahun 1963* yang ditulis oleh Asep Achmad Hidayat tahun 2014. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor utama terjadinya kerusuhan tersebut adalah kebencian mendalam masyarakat pribumi terhadap orang-orang Cina yang sudah terjadi sejak zaman kolonial. Kebencian tersebut didorong oleh kebijakan Pemerintah Kolonial yang bersifat diskriminatif dengan memberikan hak-hak istimewa kepada orang-orang Cina khususnya di sektor ekonomi. Dengan hak-hak itu, masyarakat Cina memiliki

kehidupan yang bersifat eksklusif sehingga dengan nyata tercipta garis pemisah dalam kehidupan sosial budaya. Sulit tercipta suatu peleburan atau pembauran, khususnya di antara masyarakat pribumi dan Cina. Pada masa kemerdekaan, khususnya tahun 1960-an, sejalan dengan kondisi politik yang ditunjukkan oleh terciptanya hubungan politik yang semakin mesra antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC, menjadi “bom waktu” dalam hubungan di antara dua etnis tersebut. Kondisi politik di tingkat nasional tersebut, menjadi pemicu terhadap lahirnya sentimen ras yang telah lama terjadi karena kondisi politik tersebut tanpa disadari seakan-akan mengembalikan hak-hak istimewa etnis Cina yang telah dimiliki pada masa penjajahan.

Keenam, artikel berjudul “Pembauran yang tak Pernah Selesai” (halaman 105-118), ditulis oleh Rochmawati dalam jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 6 No. 2 Tahun 2004. Dalam artikel itu disebutkan ada enam faktor belum selesainya pembauran antara etnis Cina dan etnis lokal Indonesia. Keenam faktor itu, yaitu faktor historis, khususnya berkaitan dengan politik pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan keturunan Cina khususnya. Dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda mengkategorikan penduduk Indonesia ke dalam tiga kelompok, yaitu orang Eropa sebagai golongan yang kedudukannya paling tinggi, golongan Timur Asing (etnis Cina, India dan Arab), yang kedudukannya di bawah orang Eropa, dan golongan pribumi yang menduduki posisi sosial paling rendah. Faktor kedua, berkaitan dengan faktor sosial-ekonomi. Hak-hak itu di antaranya adalah pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda diperbolehkannya memonopoli penjualan candu. Begitu pula posisi sebagai perantara jual beli antara pemerintah Hindia Belanda dengan masyarakat pribumi pada saat itu dipegang oleh kelompok etnis Cina. Faktor ketiga, yaitu kesenjangan sosial-ekonomi

antara masyarakat etnis Cina dan masyarakat pribumi. Kesenjangan itu umumnya berdampak pada munculnya kecemburuan sosial masyarakat Indonesia terhadap masyarakat keturunan Cina. Faktor keempat, adalah faktor kultural. Kebudayaan Cina adalah salah satu kebudayaan yang tua usianya di dunia. Salah satu kebanggaan etnis Cina adalah kebudayaannya tumbuh dan berkembang di suatu tempat, menyebar dan memberikan pengaruh di tempat mereka hidup. Oleh karena faktor kultural itu, etnis Cina yang memiliki kecenderungan *chauvinistik*, yaitu sering memandang rendah kebudayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa lain. Faktor kelima adalah faktor kebangsaan. Di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat cenderung didasarkan kepada ras. Dengan demikian, sangat sulit bagi kaum minoritas Cina untuk dapat diasimilasikan dengan kelompok mayoritas yang ada. Oleh karena itu, kelompok etnis Cina memperlambat jaringannya dengan kelompok *Huaqiao* (Cina perantauan). Faktor keenam, yaitu faktor agama Islam. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah sering menyerukan kepada etnis Cina untuk berubah agama, menjadi agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Walaupun di antara etnis Cina ada yang mau berpindah agama, namun secara umum program itu tidak berhasil. Kurang berhasilnya program tersebut sebagai akibat dari masih bertahannya citra buruk mengenai agama Islam di kalangan masyarakat etnis Cina. Agama Islam dipandang identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ajaran Islam juga selalu digambarkan sebagai ajaran yang terlalu keras sehingga sangat sukar untuk diadaptasi.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pembauran antara etnis Cina dan etnis, pribumi Sunda di Kota Garut belum ada yang menelitinya. Oleh karena itulah, penulis dalam artikel ini mencoba untuk meneliti pembauran etnis Cina dan etnis

pribumi Sunda berkenaan dengan pendidikan, bahasa, perkawinan, religi, dan tempat tinggalnya.

## B. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini secara garis besarnya dilakukan melalui empat tahap, yakni heuristik (pengumpulan data), kritik, interpretasi (pengolahan dan penyaringan sumber), dan historiografi atau penyusunan tulisan (Notosusanto, 1978: 10-12). Dalam tahap heuristik, penulis berusaha mengumpulkan dua macam sumber, yaitu sumber tertulis. Sumber tertulis terdiri dari buku-buku, arsip-arsip, artikel-artikel dalam surat kabar dan majalah, jurnal serta karya-karya tulis ilmiah lainnya. Pengumpulan sumber dilakukan dengan cara studi kepustakaan di berbagai tempat, terutama di Jakarta, Bandung, dan Garut. Di Jakarta, yaitu di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Perpustakaan Nasional. Di Bandung, yaitu di perpustakaan milik pribadi penulis dan Perpustakaan Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Di Garut, yaitu di perpustakaan dan Arsip Kabupaten Garut. Selain itu, penulis juga melakukan kerja lapangan atau peninjauan ke lokasi penelitian di Kota Garut.

Dalam tahap kritik, penulis mengolah dan menguji sumber-sumber yang terkumpul secara bertahap melalui kritik ekstern (pengujian sumber bendanya) dan kritik intern (pengujian isi sumbernya) untuk menentukan apakah informasi yang terkan-dung dalam sumber itu dapat dipercaya sebagai data sejarah atau tidak. Sumber-sumber yang telah disaring dan dapat dipercaya diambil, dikumpulkan, dan disusun dalam kartu data.

Dalam tahap interpretasi, data-data yang telah terkumpul ditafsirkan maknanya dalam konteks masalah yang sedang diteliti sehingga menghasilkan fakta sejarah yang diperlukan guna merekonstruksi pembauran etnis Cina dan kaum bumiputra di Kota Garut. Fakta-fakta yang telah disusun secara sistematis itu,

kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan bantuan dari ilmu-ilmu sosial yang erat hubungannya dengan ilmu sejarah, terutama ilmu politik, sosiologi, dan antropologi. Dalam tahap historiografi, hasil analisis dari fakta-fakta itu kemudian penulis susun dalam bentuk penulisan berjudul *pembauran Etnis Cina dan Kaum Bumiputra di Kota Garut pada Abad XX*.

Untuk tujuan eksplanasi, dalam tulisan ini digunakan pendekatan antropologis dengan menggunakan teori hubungan antaretnik yang dikemukakan oleh Kunstadter. Secara konseptual, hubungan antaretnik tersebut mencakup tiga konsep utama yaitu *ethnic group*, *ethnic identity*, dan *ethnic categorization* (dalam Hudaya, 1998: 102). Setiap individu hidup dalam sub-kultur sendiri yang didefinisikan oleh Fischer sebagai “*a set of modal, values, norms, and customs associated with relatively distinct social substed, exixsting eith a larger social system and culture*” (dalam Hudaya, 1998: 103). Teori ini penting untuk memahami bagaimana hubungan antaretnik (pembauran) terjadi tanpa harus menghapus kelompok etnis, identitas etnik, dan kategorisasi etnis karena teori ini menekankan pada kelompok bukan individu dalam proses terciptanya pembauran antaretnik.

## C. HASIL DAN BAHASAN

### 1. Kedatangan Imigran Cina di Garut

Kedatangan imigran Cina di Jawa Barat pada akhir abad ke-19<sup>1</sup> karena

<sup>1</sup> Secara historis, kedatangan orang-orang Cina ke Jawa Barat terjadi sejak Abad V seiring dengan kedatangan Fa Hien (seorang pendeta agama Budha) yang terdampar di Kerajaan Taru-managara (Groeneveldt, 1960: 42). Akan tetapi, belum ditemukan bukti historis dan arkeologis yang menunjukkan bahwa kedatangan orang-orang Cina pada masa itu untuk menetap. Migrasi orang-orang Cina untuk menetap di Pulau Jawa terjadi pada masa VOC yang mengeluarkan kebijakan mengenai kepen-dudukan di Nederlandsch-

tertarik oleh cepatnya perkembangan kota Batavia (Jakarta) dan dibukanya daerah Priangan (Bandung, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis) untuk para pedagang Cina (Vasanty, dalam Koentjaraningrat, 1984: 346). Para imigran Cina tersebut terdiri dari suku Bangsa Hokkien, Teo-Chiu, Hakka (*Khek*), dan Kanton yang berasal dari Provinsi Fukien dan Kwangtung. Pemukiman kaum etnis Cina di daerah Priangan mendapat izin dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada 1872.

Jumlah mereka yang datang ke kota Garut, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum, pada masa itu sulit dipastikan karena kedatangan mereka tidak sekaligus, melainkan secara bertahap. Namun demikian, berdasarkan studi kependudukan di Pulau Jawa yang dilakukan oleh P. Blekker (1870: 40-41) diketahui bahwa jumlah orang Cina di Garut (dahulu namanya Limbangan) berjumlah 6 orang yang semuanya berdiam di Kota Garut (masa itu disebut juga Distrik Negeri). Baru pada 1930, menurut *Encyclopedie van Neder-landsch-Indie*, jumlah kelompok etnis Cina dapat dipastikan yakni 1.683 orang.<sup>2</sup> Pada 2002, jumlah mereka yang termasuk Warga Negara Indonesia (WNI) adalah 2.573 orang dan yang termasuk Warga Negara

Asing (WNA) berjumlah 69 orang (Kantor Statistik BPS Kabupaten Garut, 2002: 24 dan 46).

Peta 1. Migrasi Orang Cina ke Asia Tenggara



Sumber: 9 Sebutan dan Tipe Keturunan Tionghoa di Indonesia.

Diakses dari [https://](https://www.kaskus.co.id/thread/5742e4ecddd770a7518b456a/9-sebutan-dan-tipe-ketu-runan-tionghoa-di-indonesia/)

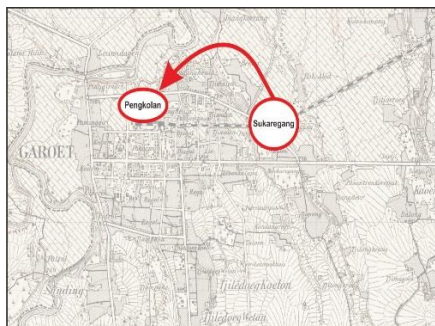
[www.kaskus.co.id/thread/5742e4ecddd770a7518b456a/9-sebutan-dan-tipe-ketu-runan-tionghoa-di-indonesia/](https://www.kaskus.co.id/thread/5742e4ecddd770a7518b456a/9-sebutan-dan-tipe-ketu-runan-tionghoa-di-indonesia/). Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 12.52 WIB.

Pada mulanya kelompok etnis Cina di Kota Garut menempati tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu di daerah Sukaregang Hilir. Akan tetapi, mulai 1920-an dan 1930-an mereka sudah mulai berangsur pindah ke sekitar Pengkolan, yakni di *Chineesche voor Straat* (sekarang Jl. A. Yani) dan *Groete Weg* (sekarang Jl. Ciledug) (lihat peta 1).

Indie. Puncak migrasi terjadi pada Abad XIX dan awal Abad XX yang juga ditandai oleh adanya kaum perempuan dalam gelombang migrasi tersebut (Al-Qurtuby, 2003: 256; Hidayat, 2014: 68; Purcell, 1981: 465; Wang, 1994: 57-66).

<sup>2</sup> Pada 1920, penduduk Hindia Belanda, sekitar 809.647 jiwa tercatat sebagai etnis Cina dan lebih dari 55% tinggal di Pulau Jawa dan Madura. Etnis Cina yang tinggal di Pulau Jawa, pada umumnya tinggal di daerah perkotaan, sedangkan etnis Cina yang tinggal di luar Pulau Jawa dan Madura, pada umumnya tinggal di pedesaan. Pada 1930, jumlah penduduk beretnis Cina naik sekitar 52% dari kondisi tahun 1920. Kelahiran yang tinggi dan arus migrasi yang menyebabkan kenaikan signifikan tersebut (Djie, 1995: 73; Hidayat, 1993: 67; Poerwanto, 2005: 54).

Peta 2: Perpindahan Kawasan Pecinan di Kota Garut



Sumber: Direkonstruksi dari *Garuet, 1909*.  
Collectie Kaarten van Nederlandsch Koloniaal.  
Inv. Nr. KIT 542201. Leiden: UBL.

Perpindahan itu, selain karena pada 1914 dihapuskannya peraturan surat jalan bagi orang-orang Cina dan pada 1915 dihapuskannya pemukiman khusus orang-orang Cina (Tan, 1981: xiv). Juga tempat pemukiman kelompok etnis Cina tersebut tidak bisa menampung lagi penduduknya akibat pertambahan penduduk. Alasan lain, perpindahan mereka ke sekitar Pengkolan (pusat kota) adalah mencari tempat yang strategis guna menyambung hidupnya sebagai pedagang. Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda lainnya yang secara tidak langsung mendukung perkembangan ekonomi kelompok etnis Cina di Kota Garut, yakni berlakunya Undang-undang (UU) Agraria 1870, yang melarang orang-orang yang bukan "pribumi" untuk memiliki tanah pertanian (Tan, 1981: xiv). UU Agraria ini juga membuka Pulau Jawa bagi perusahaan swasta (Ricklefs, 1991: 190) Tentu saja UU Agraria tersebut membatasi kelompok etnis Cina untuk memperoleh hak milik tanah secara lebih leluasa.

Foto 1. Pecinan di Kota Garut Tahun 1895 dan 2017



Sumber: *Winkelstraat, 1895*. Collectie KITLV.  
Inv. Nr. 103366. Leiden: UBL; Dokumetasi  
Peneliti, 2017

Menurut *Regering Reglement* (Peraturan Pemerintah) 1907, penduduk Hindia Belanda digolongkan secara rasialis ke dalam orang Eropa (*Europeanen*), orang Timur asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan orang Bumiputra (*Inlanders*), yang masing-masing dikenakan hukum perdata yang berbeda, walaupun dalam hukum pidana semuanya disamakan. Orang Cina, sebagai golongan Timur asing di dalam soal-soal hukum dagang malahan disamakan dengan hukum Eropa (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* no. 204 tahun 1907; Wertheim, 1959: 133-153). Menurut Onghokham, pemisahan penduduk secara rasialis pada masa pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia bisa disebut sebagai sistem politik *apartheid* (Onghokham, 2017: 3). Sistem politik itu pernah juga diterapkan di Afrika Selatan sekitar 1930 hingga 1994.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Apartheid berasal dari adalah kata Afrikans yang berarti "*perpisahan*." Ini adalah nama

## 2. Proses Pembauran

### a. Pembauran dalam Pendidikan

Bagi kelompok etnis Cina kelangsungan pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia (1945) berjalan normal. Sejak zaman Kolonial Belanda hingga 1960-an, orang-orang Cina memiliki sekolah khusus, yakni Sekolah Cina *Tionghoa Hwee Koan* (THHK) di Lio, Jl. Gunung Payung dan Sekolah Rakyat Partikular di Jl. Ciledug. Sekolah Cina di Lio merupakan kelanjutan dari zaman sebelumnya, sedangkan Sekolah Rakyat Partikular didirikan sekitar 1947/1948.

Foto 2. Gerbang Sekolah THHK di Kota Garut



Sumber: Tjan Tian Soe. Diakses dari [https:// naratagaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/](https://naratagaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/). Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 13.38 WIB.

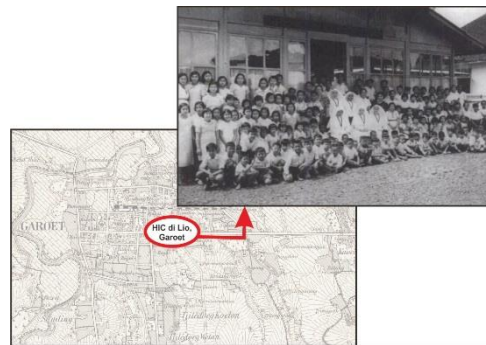
Pada masa itu kurikulum di Sekolah Cina THHK diubah lagi seperti

---

yang diberikan pada ideologi sosial ras tertentu yang dikembangkan di Afrika Selatan selama abad ke-20. Intinya, apartheid adalah tentang segregasi rasial. Ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi yang memisahkan Hitam (atau Bantu), Berwarna (ras campuran), India dan Afrika Selatan Putih (*Apa itu Apartheid di Afrika Selatan?* Diakses dari <http://www.african-union.org/apa-itu-apartheid-di-afrika-selat-an/>. Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 12.45 WIB.

pada masa Hindia Belanda. Pelajaran Bahasa Jepang sejak kemerdekaan RI 1945 dihapus dan diganti dengan Bahasa Indonesia (Bahasa Melayu). Adapun kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat Partikular hampir sama dengan kurikulum yang diterapkan pada Sekolah *Christelijk Hollandsch Indlandsche Chineesche School* (CHICS) pada masa Kolonial Belanda yang berlokasi di Talun, dengan pengantar Bahasa Belanda.

Foto 3. *Hollandsch Inlandsche-Chinezen School* di Garut, 1939



Sumber: Tjan Tian Soe. Diakses dari [https:// naratagaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/](https://naratagaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/). Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 11.41 WIB.

Digunakannya Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, karena para orang tua (Cina) masih banyak yang "mencintai" dan bisa berbicara bahasa Belanda sehingga mendorong kepada anak-anaknya untuk bersekolah di sana. Di sekolah itu, juga merupakan sekolah campuran orang Cina dan bumiputra yang terutama berasal dari golongan kelas menengah ke atas, di antaranya anak bupati, anak pengusaha kaya, dan anak dokter (dr. Tachmat dan dr. Maskawan). Sekolah Rakyat Partikular merupakan cikal-bakal Sekolah Rakyat (SR) Daya Susila, yang sekitar 1950 dipindahkan ke Jl. A. Yani (sampai sekarang). Sesudah berakhirnya pen-dudukan Tentara Belanda, orang-orang Cina yang diwakili Nio Tian Soe mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) agar Bahasa



Belanda tetap diajarkan di sekolah Daya Susila. Namun usul itu ditolak, karena kurikulumnya harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Negara RI. Sejak saat itulah, bahasa Indonesia selain sebagai bahasa pengantar, juga merupakan mata pelajaran pokok di sekolah itu. Pada 1953 didirikan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daya Susila di Jl. A. Yani (sekarang di depan SMP I & II) dan SMP Sekolah Cina THHK di Jl. A. Yani di pinggir Bioskop Chung Hwa Hwee (bekas Bioskop Sumpersari) untuk menampung mereka yang ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama. Pada tahun itu didirikan juga Bioskop Chung Hwa Hwee untuk membantu biaya penyelenggaraan pendidikan bagi Sekolah Cina THHK yang berada di Jl. Gunung Payung dan Jl. A. Yani. Ide untuk mendirikan tempat hiburan tersebut diilhami oleh orang-orang Cina di Kota Tegal (Jawa Tengah) yang telah lebih dulu mendirikan bioskop dan kolam renang untuk membantu pendidikan. Keuntungan dari bioskop itu, terutama digunakan untuk kesejahteraan para pengajarnya. Bioskop Sumpersari di Kota Garut sudah tutup sekitar 1990-an.

Ketika terjadi perbedaan ideologi di kalangan orang-orang Cina yang pro Cina Peking *versus* Cina yang pro Taipei (Taiwan) maka di Kota Garut pada 1950 didirikan sekolah Cina Pin Min yang berkiblat ke Cina Taipei. Sekolah itu, yang terletak di Jl. Ciwalen (sekarang dipakai SD Ciwalen), terdapat enam buah sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan tiga buah tingkat SMTP. Akibat perbedaan paham antara sekolah Pin Min *versus* sekolah Cina THHK yang berada di Lio maka mereka selalu bersaing dan tidak pernah sejalan. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak pernah menimbulkan bentrokan fisik di antara mereka (Sofianto, 2001: 124). Pada 1958 sekolah Cina Pin Min dilarang oleh pemerintah. Alasannya, karena pemberontakan daerah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta (PRRI/ Permesta),

persenjataannya disokong oleh Taiwan (Suryadinata, 1984: 160-161).

Foto 4. Pelajar Putri Etnis Cina di Garut



Sumber.: Majalah *Sin Po*, Desember 1937. Diakses dari <http://majalahsinpo.blogspot.co.id/2013/03/>. Tanggal 21 Maret 2018. Pukul 13.27 WIB.

Bagi orang Cina yang ingin melanjutkan sekolah ke tingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) harus ke kota lain, terutama Bandung atau Jakarta karena pada masa itu di Kota Garut sekolah khusus tingkat SMTA bagi orang-orang Cina tidak ada. Memang pada 1963 didirikan juga Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) di Jl. Bank (sekarang dipakai Sekolah Menengah Tingkat Pertama/SMTP Yos Sudarso), namun sekolah itu tidak bisa menampung semua orang yang berminat masuk sekolah karena merupakan sekolah umum yang bisa menampung, baik orang Cina maupun orang bumiputra. SMAK yang didirikan atas prakarsa Yayasan Katolik ditutup pada 1965, dengan alasan bahwa ada desakan masyarakat, terutama Yayasan Muhammadiyah, agar sekolah yang disokong oleh Yayasan Katolik ditutup.

Setelah peristiwa kudeta G 30 S 1965, sekolah Cina THHK yang berlokasi di Jl. Gunung Payung (Lio) dan Jl. A. Yani (di pinggir Bioskop *Chung Hwa Hwee*) ditutup. Alasannya, karena perkumpulan *Chung Hwa Hwee* diduga terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sekolah Cina tersebut yang di Jl. Gunung Payung akhirnya dipakai oleh Sekolah Teknik Menengah Negeri (STMN), sedangkan

yang dipinggir Bioskop *Chung Hwa Hwee* digunakan Sekolah Menengah Ekonomi (SMEA) PGRI. Demikian pula Bioskop *Chung Hwa Hwee* dan gedung Perkumpulan *Chung Hwa Hwee* di Jl. Ciledug diambil-alih oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia/Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAMI/ KAPPI) dan kemudian diserahkan kepada Korem 062 Tarumanagara dan Kodim 0611/Garut. Setelah berada di bawah Korem dan Kodim, bioskop tersebut namanya diganti menjadi Bioskop Summersari, sedangkan gedung Perkumpulan *Chung Hwa Hwee* di Jl. Ciledug dijadikan gedung Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Garut.

Foto 5. Murid TK Sekolah *Chung Hwa Chung Hui*



Sumber: Tjan Tian Soe. Diakses dari [https:// naratasgaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/](https://naratasgaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/). Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 11.41 WIB.

Semenjak ditutupnya sekolah Cina THHK maka mereka terpaksa pindah ke sekolah-sekolah swasta yang pelajarannya disesuaikan dengan sekolah-sekolah negeri, seperti Daya Susila, Yos Sudarso, dan Dharma Bhakti, yang tingkatannya hanya tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP). Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang Cina yang memasuki sekolah negeri yang ada di Kota Garut, meskipun sebenarnya (secara terbatas) mereka diperbolehkan memasuki sekolah negeri. Sekolah-sekolah negeri di Kota Garut seolah hanya menampung murid kaum bumiputra, baik dari sekitar Kota Garut maupun dari luar Kota Garut.

Pada 1973 didirikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) swasta yang dapat menampung orang Cina. Sekolah itu adalah Sekolah Menengah Atas Kristen/Protestan (SMAK) yang terletak di Jl. Bratayuda. Pelajaran di sekolah itu, yang gurunya hampir 90 % dari SMTA Negeri, disesuaikan dengan kurikulum sekolah negeri. SMAK tidak hanya menerima murid dari kelompok etnis Cina, tetapi juga menerima murid dari kaum bumiputra.

Bagi orang Cina, yang terutama keturunan WNI, kehadiran SMAK merupakan wadah untuk membaurkan diri dengan kaum bumiputra. Jumlah murid antara orang Cina dan kaum bumiputra berimbang sehingga di lingkungan sekolah nampak adanya pergaulan yang intim dan saling mengunjungi di luar sekolah. Kebiasaan saling mengunjungi merupakan sesuatu yang baru di antara generasi muda kelompok etnis Cina dan kaum bumiputra. Pada masa sebelumnya sangat jarang terjadi acara saling mengunjungi dilakukan oleh kedua belah pihak. Sayang sekali sekolah ini terpaksa tutup sekitar 1998 karena kekurangan murid, terutama orang Cina yang mampu kebanyakan sekolah di Bandung untuk mempersiapkan diri memasuki Perguruan Tinggi, terutama Perguruan Tinggi Swasta.

#### **b. Pembauran dalam Bahasa**

Tentu saja dengan adanya sekolah-sekolah swasta, seperti Daya Susila, Yos Sudarso, Dharma Bakti, dan SMAK, memberikan dampak positif kepada perkembangan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda Cina. Dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Pada umumnya orang-orang Cina menggunakan bahasa Sunda dalam pergaulan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarganya maupun dengan sesama warga Kota Garut lainnya. Bahasa Sunda yang digunakan oleh orang Cina sering kasar karena umumnya mereka kurang mengerti di mana harus

menggunakan bahasa Sunda yang halus, sedang, atau kasar (Sofianto, 2001: 27).

Dalam konteks itu, perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda di kalangan generasi muda Cina menyebabkan bahasa Cina (Mandarin) tidak berkembang sama sekali. Bahasa Cina hanya dipakai di lingkungan kecil generasi tua (Cina *totok*). Mereka tidak akan berani berbicara bahasa Cina di dekat orang bumiputra karena biasanya mereka akan dimaki atau diejek oleh orang bumiputra yang mendengarnya. Sebetulnya, ada keinginan dari generasi tua Cina untuk mempertahankan bahasa nenek moyangnya, namun apa daya karena kondisi dan situasi, generasi mudanya sudah tidak memperhatikan lagi. Selain itu, sejak 1965 berbagai hal yang berhubungan dengan kebudayaan Cina dilarang oleh Pemerintah Indonesia (Suryadinata, 2003: 2)

Perkembangan lain dari hasil pergaulan dengan kaum bumiputra adalah perubahan nama Cina menjadi nama Indonesia. Umumnya mereka yang memakai nama Indonesia adalah Cina Warga Negara Indonesia (WNI), sedangkan Cina Warga Negara Asing (WNA) masih menggunakan nama Cina. Alasan penggantian nama itu antara lain untuk kemudahan mendapatkan izin, mendapat pekerjaan atau supaya diterima oleh masyarakat Indonesia umumnya. Memang, pada Desember 1966, pemerintah Orde Baru menyederhanakan prosedur untuk perubahan nama warga negara Indonesia keturunan asing. Pemerintah dengan giat menganjurkan perubahan nama dan peraturannya yang disebarluaskan di seluruh Indonesia. Peraturan itu menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin mempercepat pembauran warga negara Indonesia keturunan asing (WNA) ke dalam "Bangsa Indonesia". Perubahan nama dari non-Indonesia menjadi "nama Indonesia" dianggap sebagai salah satu cara untuk mempercepat proses pembauran. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa

para warga negara Indonesia yang ingin mengubah nama Cina menjadi nama Indonesia harus diberikan sebanyak mungkin kesempatan seluas-luasnya (Suryadinata, 1984: 172).

### c. Pembauran dalam Perkawinan

Meskipun pada 1970-an sudah nampak pergaulan yang wajar antara sebagian generasi muda Cina dengan generasi muda bumiputra, namun perkawinan campuran di antara mereka sangat jarang terjadi, terutama perempuan Cina yang menikah dengan laki-laki kaum bumiputra. Alasannya, karena kaum bumiputra yang terutama beragama Islam membolehkan suami mempunyai istri lebih dari satu orang, sedangkan bagi mereka (perempuan Cina) beristri lebih dari satu orang akan mengganggu keserasian keluarga, mengganggu hubungan keluarga, dan lebih dari itu mereka takut hidupnya terlantar di "negeri rantau". Memang sampai saat ini, belum pernah ditemukan seorang laki-laki Cina mempunyai istri lebih dari satu orang. Biasanya laki-laki Cina "beristri" satu orang saja sampai akhir hayatnya.

### d. Pembauran dalam Religi

Mengenai religi kelompok etnis Cina setelah kemerdekaan RI sampai awal 1960 belum menunjukkan perubahan yang berarti. Baru setelah peristiwa G 30 S 1965, terjadi perubahan, terutama di kalangan generasi mudanya yang sudah terpengaruh pemikiran Barat atau bergaul dengan kaum bumiputra. Mereka yang sebelumnya secara turun-temurun menganut religi tradisional Cina, beralih menjadi penganut agama Kristen (*Laporan Vikariat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut*, 1992: 55). Selain itu di antara mereka ada yang menganut agama Islam. Perubahan disebabkan religi tradisional Cina pada masa itu tidak termasuk agama yang diakui oleh pemerintah sehingga mereka dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai agama (atheis). Menurut pandangan umum

di Kota Garut bahwa atheis identik dengan PKI. Oleh karena itulah, perasaan takut dicap sebagai anggota PKI, mereka beralih agama menjadi Kristen dan Islam. Penganut yang beralih ke agama Kristen lebih banyak dari pada ke agama Islam. Alasannya, terutama kalau orang Cina masuk agama Islam, orang bumiputra akan tetap memandang mereka sebagai orang asing (Cina). Sebaliknya, ada juga sebagian orang Cina yang memandang bahwa penganut agama Islam itu miskin atau kotor. Memang, mereka banyak melihat mesjid di perkampungan yang kumuh sehingga mereka enggan untuk masuk agama Islam. Meskipun mereka sudah beralih agama, namun sebagian besar dari mereka pada masa itu masih sebagai penganut religi tradisional Cina. Oleh karena itulah, mereka disebut sebagai penganut agama Kristen atau Islam "Kartu Tanda Penduduk" (Kristen "KTP" atau Islam "KTP").

#### **e. Pembauran dalam bidang Tempat Tinggal**

Pertumbuhan segregasi pola pemukiman yang nampak di Kota Garut adalah adanya pemisahan pola pemukiman kelompok etnis Cina yang berada di pusat Kota Garut, yakni di sekitar Pengkolan (Jl. Ciledug dan Jl. A. Yani), Jl. Mandalagiri, Jl. Guntur, Jl. Pasar Baru. Segregasi pola pemukiman kelompok etnis Cina yang ada di sekitar pusat kota menunjukkan adanya pola hubungan fungsional, artinya ada korelasi yang erat antara pola pemukiman dengan tempat bisnisnya. Hubungan antara kedua aspek tersebut mengakibatkan tumbuhnya segregasi pemukiman kelompok etnis Cina di Kota Garut yang terutama berada di sekitar Pengkolan (Jl. Ciledug dan Jl. A. Yani), Jl. Mandalagiri, Jl. Guntur, dan Pasar Baru. Di tempat-tempat itu sejak 1960-an merupakan pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan untuk melayani kebutuhan warga Kota Garut. Adanya segregasi pemukiman kelompok etnis Cina di Kota Garut menyebabkan timbulnya perbedaan secara rasial.

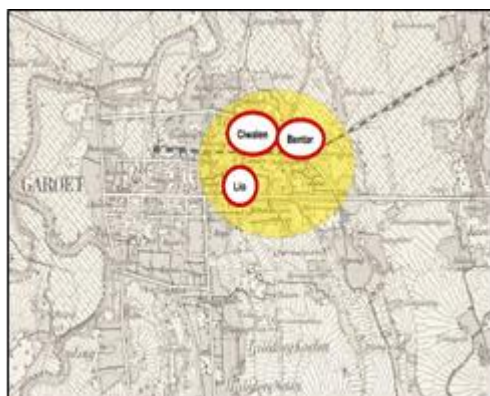
Segregasi itu menyebabkan sukarnya pembauran secara nasional antara kelompok etnis Cina dengan kaum bumiputra. Selain di pusat kota, juga terdapat tempat tinggal kelompok etnis Cina di Jl. Papandayan, Jl. Siliwangi, Jl. Cikuray, Jl. Cimanuk, dan tempat lainnya, namun tidak nampak mengelompok. Boleh dikatakan tidak ada tempat tinggal etnis Cina yang berada atau berbaur dengan kaum bumiputra.

Segregasi pola pemukiman etnis Cina di Kota Garut tidak hanya ada dan tumbuh sejak 1950-an sampai 2000-an, namun juga telah terbentuk sejak zaman Kolonial Belanda pada abad ke-19. Pada peta 1895 yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda memperlihatkan bahwa pemukiman etnis Cina berada mengelompok secara terpisah di sekitar Ciwalen dan Sukaregang. Kelompok etnis Cina pindah ke sekitar pusat Kota Garut sejak 1920-an dan 1930-an. Segregasi pemukiman etnis Cina yang berada di sekitar pusat kota mulai nampak dan terbentuk setelah kemerdekaan RI 1945. Sekarang mereka banyak memiliki tanah dan tempat tinggal di sekitar pusat kota. Perlu diketahui bahwa pemukiman etnis Cina kebanyakan terdapat di pinggiran jalan saja. Di belakang deretan pemukiman etnis Cina merupakan perkampungan kaum bumiputra. Kampung-kampung itu antara lain Lio, Mawar, Ciwalen, Cibeulik, Bentar, dan Gunung Putri (Sofianto, 2001: 34), sebagaimana terlihat pada peta berikut.

Demikian pula kuburan kelompok etnis Cina (*Santiong*) yang berada di Gugunungan (lebih kurang tiga kilometer dari Kota Garut) terpisah dari kuburan kaum bumiputra. Kuburan tersebut yang mulai ditempati sejak 1875 berkesan mewah karena terbuat dari batu-bata yang kokoh dengan ukuran yang besar. Kuburan Cina (*Santiong*) tersebut pada 1985 dipindahkan ke Ciparay (lebih kurang enam kilometer dari Kota Garut). Waktu pemindahan, di kuburan tersebut terdapat 800 makam, di mana 200 makam tidak

diketahui identitasnya karena mungkin keluarganya sudah pindah ke luar Kota Garut atau kembali ke Tiongkok. Dari semua kuburan tersebut angka tahun tertua yang ada menunjukkan angka 1875.

Peta 3. Lokasi Kawasan Perkampungan Cina dan Pribumi di Kota Garut Awal Abad XX



Sumber: Direkonstruksi dari *Garoet, 1909*. Collectie Kaarten van Nederlandsch Koloniaal. Inv. Nr. KIT 542201. Leiden: UBL.

#### D. PENUTUP

Dari uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi yang mendorong kelompok etnis Cina ke Kota Garut adalah untuk mengadu nasib atau mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesanggupannya. Dengan segala usaha dan kerja kerasnya mereka telah berhasil menjadi para pedagang kaya sehingga apabila diadakan pembedaan antara golongan ekonomi lemah dan kuat maka yang kuat selalu diartikan kelompok etnis Cina. Kelompok etnis Cina masih membatasi diri dalam hal pergaulan dengan kaum pribumi, terutama dalam hal perkawinan. Faktor ini merupakan faktor penghambat untuk terjadinya pembauran total kelompok etnis Cina dengan kaum bumiputra. Selain itu, tempat tinggal mereka yang tidak membaur dengan kaum bumiputra menyebabkan sukarnya pembauran. Faktot penunjang pembauran adalah segi bahasa (Sunda dan Indonesia), pendidikan, dan ekonomi perdagangan.

Proses yang ditempuh dalam upaya pembauran dengan kelompok etnis

Cina tidak berjalan seperti yang diharapkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Ketertutupan kelompok etnis Cina untuk tidak bergaul atau meleburkan diri di dalam masyarakat menumbuhkan kecemburuan sosial di kalangan kaum bumiputra. Oleh karena itu, tidak heran kalau mereka jadi sasaran pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan aksi kekerasan anti-Cina pernah terjadi di Kota Garut pada 1963.

Sikap masyarakat pun yang selalu bertindak negatif terhadap kelompok etnis Cina sangat disayangkan karena hal itu merupakan faktor penghambat pembauran secara total. Selama ini, boleh dikatakan bahwa hubungan antara kelompok etnis Cina dengan kaum bumiputra bersifat fungsional saja, dalam arti bahwa kelompok etnis Cina memerlukan konsumen kaum bumiputra dan pembantu/pelayan dari bumiputra golongan menengah ke bawah untuk bekerja di rumah/tokonya. Sebaliknya, kaum bumiputra pun memerlukan mereka tempat membeli barang-barang kebutuhan, baik primer maupun sekunder dan bagi kaum bumiputra kelas menengah ke bawah tempat bekerja.

Namun demikian, beberapa aspek masih harus diteliti lebih mendalam, antara lain dampak yang ditimbulkan akibat adanya gesekan atau konflik antaretnis. Menarik juga untuk diteliti keletakan pemukiman etnis Cina dalam tata ruang Kota Garut yang sifatnya cenderung tidak berubah yakni di kawasan tertentu sehingga relatif menyulitkan proses pembauran dengan masyarakat pribumi.

#### DAFTAR SUMBER

##### 1. Jurnal, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian

- Hidayat, Asep Achmad. 2014. *Kerusuhan Anti-Cina di Kota Garut Tahun 1963*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Hudaya, Bambang. 1998. "Pembauran Identitas Etnik di Kalangan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada"

- dalam Jurnal *Humaniora*. Nomor 9. November-Desember 1998. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kartika, N. 2000.  
“Etnis Tionghoa dan Peranan-nya dalam Pembangunan Jakarta Tahun 1966-1977”, dalam *Jurnal Sastra*, Volume 8 No. 5 Juli 2000.
- Rochmawati. 2004.  
“Pembauran yang Tidak Pernah Selesai”, dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 6 No. 2 Tahun 2004.
- Suratminto, Lilie. 2004.  
“Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740 Dampak Konflik Golongan “Prinsgezinden” dan “Staatsgezinden” di Belanda ?”, dalam *Jurnal Wacana* Vol 6, No. 1, April 2004.
- Wang, Gung-Wu. 1994.  
“Sojourning: The Chinese Experience in Southeast Asia” in *Asian Culture*. No. 18. Kualalumpur.
- 2. Buku**
- Al-Qurtuby, Sumanto. 2003.  
*Arus Cina Islam Jawa*. Cet. K-2. Yogyakarta: Ahimskarya Press.
- Antariksa. 2016.  
*Teori & Metode Pelestarian Kawasan Pecinan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Blekker P. 1869.  
“Nieuwe Bijdragen tot de Kennis der Bevolking-statistiek van Java” dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 16de Deel, 4deAfl.*, [3e Volgreeks, 4e Deel]. Batavia. Hlm. 482-483.
- Die, Ong Eng. 1981.  
“Peranan Orang Tionghoa dalam Perdagangan”, dalam Mely G. Tan (ed.). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pem-binaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- Djie, Ting Liat. “De Economische Positie de Chineezen op Java” dalam Lim Twan Djie. 1995. *Perdagangan Perantara Distribusi Orang-Orang Cina di Jawa; Suatu Studi Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- Encyclopedie van Nederlandsche-Indie*. 1917. Tweede Druk Eerste Deel. Leiden: s-Gravenhage Martinus Nijhoff.
- Garoet, 1909*.  
Collectie Kaarten van Nederlandsch Koloniaal. Inv. Nr. KIT 542201. Leiden: UBL.
- Groeneveldt, W. P. 1960.  
*Historical Notes on Indonesia & Malaya Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratarata.
- Hidayat Z. M. 1993.  
*Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Husodo, Siswono Yudo. 1985.  
*Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- Kantor Statistik BPS Kabupaten Garut. 2002.  
*Kecamatan Garut Kota dalam Angka Tahun 2002*. Garut: Kantor Statistik BPS Kabupaten Garut.
- Laporan Vikariat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut*. Garut: 1992.
- Lohanda. “Masalah Cina dalam Perjalanan Sejarah Cina di Indonesia”, dalam *Pardede*, dkk. 2002.
- Antara Prasangka dan Realita*. Jakarta: Pustaka Inspirasi.
- Notosusanto, Nugroho. 1978.  
*Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengalam-an)*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Onghokham. 2017.  
*Migrasi Cina, Kapitalisme Cina dan Anti Cina*. Cetakan ke-2. Depok: Komunitas Bambu.
- Panglaykim, J. dan I. Palmer. 1981. “Studi Mengenai Kewiraswasta-an di Negara-negara: Kisah Sebuah Perusahaan Tionghoa di Indonesia”, dalam Mely G. Tan (ed.). *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- Poerwanto, Hari. 2005.  
*Orang Cina Khek dari Singkawang*. Depok: Komunitas Bambu.

- Purcell, Victor. 1981.  
*Chinese in Southeast Asia*. 2<sup>nd</sup> Edition.  
Kualalumpur: Oxford University Press.
- Ricklefs, M.C. 1990.  
*Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta:  
Gadjah Mada University Press.
- Skinner, G. William. 1981.  
"Golongan Minoritas Tonghoa", dalam  
Mely G. Tan (ed.). *Golongan  
Etnis Tionghoa di Indonesia: Suatu  
Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa*.  
Jakarta: Gramedia.
- Sofianto, Kunto. 2001.  
*Garuet Kota Intan Sejarah Lokal Kota  
Garut Sejak Zaman Kolonial Belanda  
Hingga Masa Kemerdekaan*.  
Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Staatsblad van Nederlandsch-Indie* no. 204,  
tahun 1907.
- Suryadinata, Leo. 1984.  
*Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta:  
Grafiti Pers.
- Suryadinata, Leo. 2003.  
*Jurnal Antropologi Indonesia* 71.
- Tan, Mely G. 1981.  
"Kata Pengantar", dalam Mely G. Tan  
(ed.). *Golongan Etnis Tionghoa di  
Indonesia: Suatu Masalah Pembinaan  
Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Gramedia.
- Vasanty, Puspa. 1984.  
"Kebudayaan Orang Tionghoa di  
Indonesia", dalam Koentjaraningrat,  
ed. *Manusia dan Kebudayaan di  
Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Wertheim, W. F. 1959.  
*Indonesian Society in Transition*. The  
Hague-Bandung: Van Hoeve.
- Winkelstraat, 1895*.  
Collectie KITLV. Inv. Nr. 103366.  
Leiden: UBL.
- Apa itu Apartheid di Afrika Selatan?* Diakses  
dari <http://www.afri-can-union.org/apa-itu-apartheid-di-afrika-selatan/>. Tanggal  
20 Ma-ret 2018. Pukul 12.45 WIB.
- Tjan Tian Soe. Diakses dari <https://naratasgaroet.net/2016/02/15/tjan-tian-soe/>. Tanggal 20 Maret 2018. Pukul  
11.41 WIB.
- Majalah *Sin Po*, Desember 1937. Diakses dari  
<http://majalah-sinpo.blogspot.co.id/2013/03/>. Tanggal  
21 Maret 2018. Pukul 13.27 WIB.

### 3. Internet

- 9 Sebutan dan Tipe Keturunan Tionghoa di  
Indonesia. Diakses dari  
<https://www.kaskus.co.id/thread/5742e4ecddd770a7518b456a/9-sebutan-dan-tipe-keturunan-tionghoa-di-indonesia/>.  
Tanggal 20 Maret 2018. Pukul 12.52  
WIB.

